Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018

Mochamad Dika Citrawan*¹

¹*Universitas Tidar Magelang

¹*dikacitrawan1801@gmail.com

Submitted: 05 February 2025
Review: 05 February 2025
Revised: 07 February 2025
Accepted: 11 February 2025
Published: 11 February 2025

Citation (APA 7th): Name.
(2022). Article Title. JMB:
Journal Of Management
Branding, Vol 2, No. 1
(February) 2025, 1-13

Copyright: © 2025 by the authors

Abstrak: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun sektor ekonomi Indonesia telah menunjukkan kemajuan, angka kemiskinan, terutama di wilayah urban padat penduduk seperti DKI Jakarta, masih menjadi isu signifikan. DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, seharusnya memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Namun, meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta tercatat tinggi, ketimpangan ekonomi yang signifikan masih mengakibatkan tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama di beberapa kabupaten/kota. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada periode 2014-2018. Dengan menggunakan data PDRB dan jumlah penduduk dari kabupaten/kota di DKI Jakarta, penelitian ini mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kemiskinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Kemiskinan, PDRB; Jumlah Penduduk; Ketimpangan Ekonomi; DKI Jakarta.

Abstract: Poverty remains one of the primary issues faced by many countries, including Indonesia. Despite economic advancements, poverty, particularly in densely populated urban areas like DKI Jakarta, continues to be a significant issue. As the capital city and economic hub, DKI Jakarta should ideally contribute to poverty alleviation. However, despite a high Gross Regional Domestic Product (GRDP), significant economic disparities still result in persistent poverty, particularly in certain districts and municipalities. This study aims to analyze the impact of GRDP and population size on poverty levels in DKI Jakarta from 2014 to 2018. By using data on GRDP and population from various districts in DKI Jakarta, this research identifies the relationship between these variables and poverty. The findings are expected to provide policy recommendations for the provincial government to design more inclusive and sustainable development strategies, thus reducing socio-economic disparities and combating poverty in the region.

Keywords: Poverty; GRDP; Population Size; Economic Inequality; DKI Jakarta.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh berbagai negara (Mardiah, et al. 2024), termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengalami berbagai pencapaian dalam sektor ekonomi, angka kemiskinan masih menjadi isu yang signifikan, terutama di wilayah urban yang padat penduduk seperti DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin nasional tercatat sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang, dan kembali turun menjadi 8,57% pada September 2024 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 24,06 juta orang.

Di DKI Jakarta, tingkat kemiskinan juga menunjukkan penurunan, dari 4,30% pada Maret 2024 dengan jumlah penduduk miskin 464,93 ribu orang. Meskipun demikian, ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Faktor seperti akses terbatas terhadap lapangan kerja, tingginya urbanisasi, serta distribusi pendapatan yang belum merata menjadi penyebab utama mengapa kemiskinan tetap menjadi isu signifikan, khususnya di kawasan perkotaan padat penduduk seperti DKI Jakarta.

Tingkat kemiskinan antarkabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta juga cukup tinggi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Secara rata-rata, selama periode 2014-2018 memiliki tingkat kemiskinan paling rendah yaitu hanya sebesar 8,50 persen. Sebaliknya tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Pidie Jaya mencapai 29,83 persen. Sementara Kabupaten Nagan Raya memiliki tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Aceh mencapai 28 persen.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta					
Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kep Seribu	2.67	11.01	12.58	12.98	2.88
Jakarta Selatan	80.79	3.47	3.27	3.38	63.38
Jakarta Timur	96.54	3.10	3.19	3.31	91.38
Jakarta Pusat	37.65	3.70	3.91	3.78	33.19
Jakarta Barat	90.95	3.46	3.38	3.25	86.42

Sumber : Data diolah Eviews 10, 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, memberikan gambaran penting terkait kemampuan ekonomi suatu daerah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks DKI Jakarta, PDRB yang tinggi seharusnya dapat menciptakan lebih banyak peluang ekonomi bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan di Jakarta dapat menyebabkan kemiskinan tetap tinggi di kelompok masyarakat tertentu.

Selain itu, jumlah penduduk yang terus meningkat pesat di DKI Jakarta juga memberikan tantangan tersendiri dalam hal distribusi sumber daya dan pemerataan pembangunan. Jakarta yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa menghadapi tekanan besar terkait ketersediaan lapangan pekerjaan, fasilitas sosial, dan infrastruktur. Tingginya jumlah penduduk berpotensi meningkatkan persaingan dalam pasar tenaga kerja, serta memperburuk ketidaksetaraan pendapatan yang akhirnya berdampak pada kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 hingga 2018. Dengan mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah provinsi dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan memerangi kemiskinan di DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018"

KAJIAN LITERATUR

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), kemiskinan dapat diukur berdasarkan garis kemiskinan yang mencerminkan kebutuhan minimum per kapita dalam memenuhi standar hidup layak. Berdasarkan laporan terbaru BPS, angka kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dari 9,36% pada Maret 2023 menjadi 9,03% pada Maret 2024, dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 25,22 juta orang (BPS, 2024). Meskipun terjadi penurunan, tantangan dalam pengentasan kemiskinan masih ada. Asian Development Bank (ADB, 2022) mencatat bahwa sekitar 9,5% populasi Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, sementara 2,3% bekerja dengan pendapatan di bawah \$1,90 per hari (ADB, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, kesenjangan sosial masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi.

Menurut laporan World Bank (2023), salah satu penyebab utama kemiskinan di Indonesia adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan sosial. Faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan, serta distribusi infrastruktur yang tidak merata, memperburuk kondisi kemiskinan di berbagai daerah. Selain itu, urbanisasi yang pesat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, meningkatkan tekanan terhadap sektor perumahan dan tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat memperburuk tingkat kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat ([World Bank, 2023](#)).

Tingkat kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia. Tingkat Kemiskinan dalam Nizar (2013) adalah jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun yang dihitung dalam persen populasi. Tingkat kemiskinan ini digunakan sebagai indikator perubahan kemiskinan setiap tahun dan dapat digunakan sebagai pembandingan tingkat kemiskinan antar kab/kota ataupun provinsi.

Presentase jumlah kemiskinan dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$$

Dimana:

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.

Kemiskinan itu sendiri adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak mereka, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari. Kemiskinan ini ditandai oleh sikap dan tingkah laku yang tidak dapat diubah seperti lemahnya kemauan tetap untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya nilai tukar hasil produksi, rendahnya produktifitas, terbatasnya modal yang dimiliki berpartisipasi dalam pembangunan (Soegijoko, 1997:137).

Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sulit diurai dan kerap kali terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut.

Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata

Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Studi oleh Prasetyo & Hidayat (2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, karena hasil pertumbuhan belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok berpenghasilan rendah (Prasetyo & Hidayat, 2023).

Tingkat Pengangguran

Tingginya tingkat pengangguran berkontribusi signifikan terhadap kemiskinan, karena kurangnya kesempatan kerja menyebabkan banyak individu tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil. Suryani et al. (2022) menemukan bahwa peningkatan tingkat pengangguran berkorelasi positif dengan kenaikan angka kemiskinan di beberapa wilayah Indonesia (Suryani et al., 2022).

Inflasi dan Kenaikan Harga Barang

Kenaikan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, dapat mengurangi daya beli masyarakat miskin. Menurut penelitian Rahmawati (2021), inflasi yang tinggi secara langsung berdampak pada peningkatan garis kemiskinan di Indonesia, meskipun dalam jangka panjang dampaknya bisa bervariasi (Rahmawati, 2021).

Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan usaha. BPS (2022) mencatat bahwa pandemi meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,41% pada tahun 2020 dan butuh waktu beberapa tahun untuk kembali ke level sebelum pandemi (BPS, 2022).

Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Kenaikan harga BBM berdampak besar pada inflasi dan meningkatkan biaya hidup masyarakat miskin. Laporan UMM (2023) menyatakan bahwa kenaikan BBM tahun 2022 menyebabkan lonjakan harga barang kebutuhan pokok, yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan (UMM, 2023).

Pendidikan yang Rendah

Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas menyebabkan rendahnya keterampilan dan peluang kerja bagi masyarakat miskin. Studi World Bank (2023) menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan rendah memiliki kemungkinan lebih besar untuk tetap dalam siklus kemiskinan dibandingkan mereka yang memiliki akses pendidikan lebih baik (World Bank, 2023).

Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menyebabkan sebagian besar kekayaan terpusat pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat tetap dalam kemiskinan. OECD (2024) melaporkan bahwa indeks ketimpangan Gini di Indonesia masih cukup tinggi, dengan dampak langsung terhadap sulitnya pengentasan kemiskinan (OECD, 2024).

Akibat keterbatasan dan ketertidadaan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena jika kualitas manusianya rendah pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti pendapatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penyebab kemiskinan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dari tingkat pendidikan yang rendah menjadikan mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga kebutuhan hidup mereka seperti makan, kesehatan, dan tempat tinggal sulit mereka dapatkan karena pendapatan mereka yang kurang dan biasanya masyarakat miskin terisolasi di titik itu yang tidak dapat memungkinkan mereka bisa beradaptasi di daerah lain.

Kriteria Kemiskinan

Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 menetapkan sembilan kriteria fakir miskin yaitu : tidak memiliki tempat tinggal yang layak, kepala keluarga, tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap, pernah mengalami kekurangan pangan dalam setahun terakhir, pengeluaran untuk makanan melebihi setengah dari total pengeluaran, tidak mampu membeli pakaian baru setidaknya sekali dalam setahun, tempat tinggal dengan lantai sebagian besar dari tanah atau plesteran, dinding tempat tinggal terbuat dari bahan tidak permanen seperti bambu, papan kayu, atau material sejenis, akses terbatas atau tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak, tidak memiliki akses terhadap air bersih.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB menjadi indikator utama dalam mengukur kinerja ekonomi suatu daerah serta menentukan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), PDRB dihitung berdasarkan pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan, yang mencerminkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah secara komprehensif. Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah, semakin besar kapasitas ekonomi wilayah tersebut dalam menciptakan pertumbuhan, lapangan kerja, serta pendapatan bagi masyarakatnya. Namun, PDRB yang tinggi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan merata, karena ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia (World Bank, 2022).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi yang mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi regional serta sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), PDRB dapat diukur dalam dua bentuk, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai produksi barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pasar pada tahun berjalan. Data ini digunakan untuk melihat struktur ekonomi dan peran sektor ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai produksi barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Metode ini digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi (BPS, 2023).

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah total individu yang tinggal di suatu wilayah dalam periode tertentu, mencakup semua kelompok umur, jenis kelamin, dan latar belakang sosial-ekonomi. Jumlah penduduk merupakan faktor penting dalam analisis demografi dan perencanaan pembangunan, karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan (BPS, 2023). Menurut United Nations Population Division (UNPD, 2022), jumlah penduduk suatu negara atau wilayah ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi. Perubahan dalam ketiga faktor ini dapat menyebabkan pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mendefinisikan jumlah penduduk sebagai total populasi yang tercatat berdasarkan sensus penduduk, proyeksi pertumbuhan alami, serta data migrasi domestik dan internasional. Jumlah penduduk tidak hanya mencerminkan ukuran populasi suatu wilayah, tetapi juga menjadi indikator utama dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dapat menjadi modal pembangunan ekonomi jika diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun juga dapat menjadi tantangan sosial dan ekonomi jika pertumbuhan tidak terkendali, menyebabkan tekanan terhadap sumber daya alam, fasilitas publik, dan distribusi kesejahteraan (World Bank, 2023).

Aspek Kependudukan

Aspek kependudukan meliputi jumlah dan perkembangan, pertumbuhan, persebaran, kepadatan, kualitas, serta mobilitas penduduk. Pertama jumlah dan perkembangan penduduk, jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan yang mana hal ini bisa berdampak baik untuk negara jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Kedua pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalkan, peperangan, wabah penyakit, atau epidemic, kelaparan, dan bencana alam. Selain itu kestabilan negara, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Ketiga persebaran penduduk, persebaran penduduk Indonesia tidak merata. Hal ini terlihat hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa dan Madura. Padahal, kedua pulau tersebut hanya memiliki luas kurang lebih 7% dari luas wilayah Indonesia. Maka hal itu akan berdampak pada berkurangnya lahan perekonomian akibat dijadikan tempat tinggal oleh sekelompok orang yang tinggal di wilayah itu sendiri. Keempat kualitas penduduk, kualitas penduduk adalah suatu penduduk yang memiliki tingkat kemampuan dan mampu memberikan kontribusi nyata

untuk negara. Kualitas penduduk bisa di lihat dari pasilitas negara yang memfasilitasinya jika suatu negara mampu memberikan pasilitas yang baik terhadap penduduk nya maka penduduknya akan mempunyai tingkat kualitas yang bagus namun sebalik nya jika pasilitas yang diberikan oleh negara tidak cukup untuk menampung penduduk nya maka hal itu akan berdampak pada ketidak stabilan kualitas penduduk satu dengan yang lainnya.

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah suatu kegiatan urbanisasi atau perpindahan tempat tinggal yang dilakukan masyarakat kota kepermukiman perkampungan atau masyarakat kecil. sehingga hal itu menjadi permasalahan penduduk yang cukup tinggi yang dapat mengakibatkan hambatan dalam laju perekonomian terutama berdampak kepada peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan keadaan yang demikian itu di mungkinkan pertumbuhan penduduk menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan efektif.

Kerangka Model Penelitian

Adapun kerangka teoritik pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data panel yaitu gabungan dari data kurun waktu (time series) mulai dari periode 2014 - 2018 dan data cross section meliputi semua Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta. Data cross-section adalah data yang diperoleh dari satu maupun lebih objek penelitian dalam satu periode yang sama. Fokus penelitian ini adalah pada analisi pengaruh produk domestik regional bruto, dan jumlah penduduk, dalam rangka untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Data yang diperoleh berasal dari publikasi BPS terdiri dari data presentase penduduk miskin, laju produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga konstan dan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta, dan publikasi lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model data panel, yang berupa data time series.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dimana metode ini akan menggabungkan data cross section dan time series. Variabel dependen yang digunakan merupakan Tingkat Kemiskinan, sedangkan variable indenpendennya terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk (JP). Secara matematis, dapat dituliskan sebagai berikut ini :

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1PDRB_{it} + \beta_2JP_{it} + e_{it}$$

Common Effect

Regresi common effect merupakan salah satu Teknik yang paling sederhana dalam mengestimasi data panel dengan hanya menggabungkan data cross section dan time series tanpa melihat perbedaan yang ada diantara waktu dan individu, maka model tersebut dapat diestimasi dengan metode ordinary least square (Gujarati, 2013).

Fixed Effect

Pada regresi fixed effect, asumsi yang digunakan bahwa intersep merupakan perbedaan antar individu, sedangkan slopenya akan tetap sama antar individu. Untuk mengestimasi model ini dapat menggunakan Teknik dummy variable dalam menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model ini dikenal dengan Teknik Least Square Dummy Variables (Gujarati, 2013).

Random Effect

Pada model ini perbedaan antar individu maupun waktu diakomodasikan melalui variable error. Teknik ini akan memperhitungkan bahwa error mungkin akan berkorelasi antara time series dan cross section (Gujarati, 2013).

Uji Signifikansi Model Fixed Effect (Uji Chow)

Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang paling baik antara fixed effect dan common effect. Uji Chow merupakan uji yang akan melihat perbedaan dua model regresi dengan menggunakan statistik uji F (Widarjono, 2009).

Uji Signifikansi Model Random Effect (Uji Lagrange Multiplier)

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mana yang lebih baik antara *random effect* dengan *common effect*. Pengujian dilakukan melalui uji statistik *Lagrange Multiplier* yang dikembangkan oleh *Beusch-Pagan*. Uji statistik ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan derajat bebas sebesar jumlah variabel independen yang digunakan. Dalam menguji signifikansi pada model *random effect* didasarkan pada nilai residual dari model *common effect* menggunakan uji *Beusch-Pagan* (Gujarati, 2013).

Uji Signifikansi Fixed Effect atau Random Effect (Uji Hausman)

Uji Hausman dilakukan apabila jika setelah melakukan pengujian model *fixed effect* dan *Random Effect* hasilnya adalah keduanya lebih baik dari model *common effect*. Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui model terbaik antara model *fixed effect* dan *random effect*. Hausman (1978) telah melakukan pengembangan pada suatu uji statistik dalam memilih untuk menggunakan model *fixed effect* atau *random effect* dengan menggunakan statistik uji H dimana mengacu pada distribusi *chi-square* dengan derajat bebas sebesar jumlah variabel independen yang digunakan. Kesimpulan yang akan diambil apabila H_0 ditolak, maka model *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*, namun jika H_0 diterima, maka model regresi *random effect* jauh lebih baik dibandingkan dengan model regresi *fixed effect*.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sebaran data variabel terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji ini dilakukan melalui Jarque Bera test. Adapun hipotesis dalam uji normalitas dengan taraf signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$, yaitu :

H_0 = Tidak terjadi pelanggaran normalitas dan data terdistribusi dengan normal apabila prob.JBtest > 0.05

H_a = Terjadi pelanggaran normalitas dan data tidak terdistribusi dengan normal apabila prob.JBtest < 0.05

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya asumsi homoskedastisitas. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui Uji White, dimana jika nilai Chi-Square statistik lebih besar dari Chi-Square tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai Obs*R-squared Uji White dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan. Adapun hipotesis dalam uji heteroskedastisitas dengan taraf signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$, yaitu:

H_0 = Tidak terjadi pelanggaran heteroskedastisitas apabila nilai prob. > 0.05

H_a = Terjadi pelanggaran heteroskedastisitas apabila nilai prob. < 0.05

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji hubungan antara anggota-anggota dalam pengamatan dalam himpunan beberapa selang/deret waktu (serial correlation) atau antara anggota pengamatan bermacam entitas atau ruang (spatial correlation). Autokorelasi dapat disebabkan oleh aspek keterlambatan data ekonomi, bias aturan yang mengeluarkan variabel yang cocok dari model, bias aturan bentuk fungsional, kurun waktu atau lag, rekayasa data, perubahan data, dan non-stasioneritas dalam model. Metode Pendekatan yang dipakai untuk memeriksa autokorelasi dilaksanakan dengan cara uji LM/ LM Test.

Uji Multikolinearitas

Adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi disebut juga dengan Multikolinearitas. Metode yang digunakan dalam mendeteksi multikolinearitas ini adalah metode Klein dan kesepakatan Gujarati terhadap nilai korelasi yang terjadi antar variabel, yaitu dengan membandingkan antara R^2 penyesuaian (adjusted R^2) dari hasil regresi antar variabel bebas. Adapun hipotesis dalam uji multikolinearitas dengan taraf signifikansi sebesar 0.08, yaitu:

H_0 = Tidak terjadi pelanggaran multikolinearitas apabila nilai adjusted $R^2 > 0.08$

H_a = Terjadi pelanggaran multikolinearitas apabila nilai adjusted $R^2 < 0.08$

Uji Statistik

Uji Signifikansi Parameter (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t, dimana nilai t hitung dapat diperoleh dengan formula berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

Keterangan :

β_i : Koefisien Regresi

$Se(\beta_i)$: Standart Error Koefisien Regresi

Ada dua cara untuk menentukan uji t yang pertama dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t hitung dapat diperoleh dari nilai t statistik pada output eviws, sedangkan nilai t tabel dapat diperoleh dari tabel t dengan menggunakan degree of freedom (df) sebesar n-k.

Jika t-hitung $>$ t-tabel maka H_0 ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi (negatif/positif) variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, Jika t-hitung $<$ t-tabel maka H_0 diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Gambar 2. Kurva Normal Uji t

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk menguji tingkat signifikan variable independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh cara yang digunakan dengan menghitung Fhitung dengan Ftabel. Jika $F > F$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 di tolak. Perubahan yang terjadi pada variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh perubahan variabel independen, di mana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan persentase variasi total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi terikat dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel bebas yang dimasukkan di dalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat sangat terbatas.
2. Nilai R^2 yang mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel terikat (Gujarati, 2010).

HASIL PENELITIAN

Dalam menganalisis pengaruh pembangunan ekonomi dengan variabel PDRB (X1), dan Jumlah Penduduk (X2) terhadap Tingkat Kemiskinan di provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2018 dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Alat bantu pada model analisis ini menggunakan perangkat komputer Eviews 10. Hasil pengujian terhadap model regresi tersebut dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Variable	Coefficie nt	Std. Error	t-Statistic	Prob.	F-statistic	R-squared
C	11670.03	10890.51	1.071578	0.2934		
JP	0.031937	0.003573	8.938631	0.0000	55.66475	0.804814
PDRB	-5.84E-06	3.24E-05	-0.180384	0.8582		

Sumber: Data Diolah Eviews 10, 2024

Dari hasil estimasi pada tabel tersebut dapat dituliskan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemiskinan (Y)} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$\text{Tingkat Kemiskinan (Y)} = 11670.03 - 5.84E-06 X_1 + 0.031937 X_2 + e$$

Untuk menginterpretasi hasil regresi diatas maka harus dilakukan uji t terlebih dahulu. Uji t ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan statistik t dengan membandingkan t table. Nilai t-tabel diperoleh dari α ; df (n-k). Jika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi (negatif/positif) variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya, Jika t-hitung < t-tabel maka Ho diterima, artinya salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Nilai t-tabel: α : df (n-k) = ($\alpha = 0,05/2 = 0.025$; df = 28) = 2,048.

Tabel 3. Hasil Uji t

Variable	t-Statistic	Prob.	t-tabel	Kesimpulan
JP	8.938631	0.0000	2,048	Signifikan
PDRB	-0.180384	0.8582	2,048	Tidak Signifikan

Sumber : Data diolah dengan Eviews 10, 2024

Uji Statistik

Uji Statistik digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, dimana nilai F-tabelnya adalah, $df = (k-1, n- k) = (3-1, 30-3) = (2,27) : \alpha 5\% = 3,35$. Dari table diatas. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $55.66475 > 3,35$ sehingga keputusannya adalah Hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternative (Ha) diterima, maka terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel independen (PDRB, dan jumlah penduduk) secara simultan terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan).

Gambar 3. Uji F

Uji Koefisien Determinan (R²)

Koefisien determinan R² variabel independent (PDRB, dan jumlah penduduk) secara bersama sama mempunyai kontribusi terhadap variabel dependent (tingkat kemiskinan) sebesar 0.804814 atau 80,4% yang ditunjukkan oleh R-squared pada tabel 4.3. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel

independent terhadap variabel dependen sebesar 80,4% sedangkan 19,6 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data BPS diolah evIEWS 10, 2024

Dari hasil Uji Normalitas diatas menunjukkan bahwa, Model Fixed Effect berdistribusi normal karena nilai probabilitas jarque bera nya lebih dari 0.05 yaitu 0.454676 yang artinya Model Fixed Effect lolos dari Uji Normalitas.

Hasil Uji Multikoleniaritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikoleniaritas

	PDRB	JP
PDRB	1.000000	-0.516776
JP	-0.516776	1.000000

Sumber : Data BPS dioleh Eviews 10, 2024

Dari hasil uji Multikoleniaritas diatas menunjukkan bahwa,, Model Fixed Effect tidak megalami Multikoleniaritas karena hubungan masing masing variabel memiliki nilai kurang dari 0,8. Artinya Model Fixed Effect lolos dari Uji Multikoleniaritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	73.61780	928.8389	0.079258	0.9374
X1	0.000793	0.000305	2.601410	0.2149
X2	4.68E-08	2.76E-06	0.016955	0.9866
R-squared	0.253552	Mean dependent var		1439.653
Adjusted R-squared	0.198259	S.D. dependent var		1553.127
S.E. of regression	1390.669	Akaike info criterion		17.40760
Sum squared resid	52216949	Schwarz criterion		17.54772
Log likelihood	-258.1140	Hannan-Quinn criter.		17.45242
F-statistic	4.585647	Durbin-Watson stat		2.155978

Prob(F-statistic) 0.019297

Sumber : Data BPS dioleh Eviews 10, 2024

Dari hasil uji Heteroskedastisitas diketahui bahwa Model Fixed Effect tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas karena dari masing masing variabel memiliki nilai probabilitas lebih dari 0.05, artinya Model Fixed Effect lolos Uji Heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDRB	-5.84E-06	3.24E-05	-0.180384	0.8582
JP	0.031937	0.003573	8.938631	0.0000
C	11670.03	10890.51	1.071578	0.2934
R-squared	0.804814	Mean dependent var		65293.67
Adjusted R-squared	0.790356	S.D. dependent var		35611.48
S.E. of regression	16305.41	Akaike info criterion		22.33102
Sum squared resid	7.18E+09	Schwarz criterion		22.47114
Log likelihood	-331.9653	Hannan-Quinn criter.		22.37585
F-statistic	55.66475	Durbin-Watson stat		0.049672
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data BPS dioleh Eviews 10, 2024

Menurut Tabel DW, diperoleh data-data sebagai berikut:

Jumlah Observasi : 45 sampel

DW: 0.049672

DU: 1.5666

DL : 1.2837

4- DU : $4 - 1.5666 = 2.4334$

4-DL : $4 - 1.2837 = 2.7163$

Berdasarkan perhitungan Durbin Watson, dapat dilihat bahwa pada model ini terjadi autokorelasi positif. Sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut

PEMBAHASAN

Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil tabel diatas menunjukkan nilai t-hitung < t tabel yaitu $-0.180384 < 2,048$ dengan nilai probabilitas sebesar $0.8582 > 0,05$ dimana hipotesis nol (Ho) diterima dan Hipotesis alternative (Ha) ditolak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta.

Pengaruh Jumlah Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil tabel diatas menunjukkan nilai t-hitung > t tabel yaitu $8.938631 > 2,048$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ dimana hipotesis nol (Ho) ditolak dan Hipotesis alternative (Ha) diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

Nilai konstanta sebesar 11670.03 artinya jika variabel independen nilainya konstan (PDRB, dan Jumlah Penduduk) maka variabel Tingkat kemiskinan sebesar 11670.0 . Koefisien regresi variabel X1 yaitu PDRB sebesar - 5.84E-06. menurut hasil uji t PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga nilai koefisien PDRB sama saja dengan nol atau tidak bermakna. Koefisien regresi variabel X2 yaitu jumlah penduduk sebesar 0.031937 artinya apabila nilai indeks jumlah penduduk meningkat 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0.031937 %.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali cenderung memperburuk kondisi ekonomi masyarakat karena keterbatasan sumber daya alam dan lapangan pekerjaan. Selain itu, berdasarkan model estimasi Random Effect, variabel Produk Domestik Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menunjukkan bahwa pada tahap awal pembangunan, kemiskinan cenderung meningkat, tetapi seiring dengan perkembangan ekonomi yang lebih stabil, jumlah penduduk miskin berangsur-angsur berkurang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa PDRB berperan penting dalam menekan angka kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai probabilitas $0.000 < \alpha$ (5%), yang mengindikasikan pengaruh signifikan secara statistik. Oleh karena itu, peningkatan PDRB perlu diimbangi dengan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan produksi dan mengoptimalkan pengeluaran yang berkaitan dengan peningkatan PDRB untuk mendukung pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut pada periode 2014–2018.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan variabel jumlah penduduk dan PDRB sebagai determinan kemiskinan, sementara faktor lain seperti tingkat pendidikan, inflasi, dan kebijakan sosial belum dimasukkan dalam model. Kedua, cakupan data yang digunakan terbatas pada periode 2014–2018, sehingga hasil penelitian ini mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini atau tren jangka panjang. Ketiga, metode analisis yang digunakan belum mempertimbangkan faktor struktural dan heterogenitas antar wilayah yang dapat memengaruhi hubungan antara PDRB dan kemiskinan secara lebih kompleks.

Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan variabel diperluas dengan memasukkan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kemiskinan, seperti tingkat pendidikan, pengangguran, investasi, serta kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, analisis dapat diperluas dengan menggunakan data yang lebih terkini dan rentang waktu yang lebih panjang agar hasil penelitian lebih relevan dan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dinamika kemiskinan. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan metode ekonometrika yang lebih kompleks, seperti model panel dinamis atau spatial econometrics, untuk memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara lebih mendalam serta mempertimbangkan efek spasial antar daerah.

REFERENSI

- Akhtar, R. (2018). Influencing factors of poverty in Pakistan: Time series analysis. February 2017.
- Ashta, A. (2015). A minimum wage solution to halving world poverty by 2015: A stakeholder approach. 1–31.
- Azizah, E. W., & Kusuma, H. (2018). Pengaruh pendidikan, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Timur. 2, 167–180.
- Fosu, A. K. (2018). Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence. Research in Economics, Growth, inequality, and poverty reduction in developing countries: Recent global evidence, R. April 2011. <https://doi.org/10.1016/j.rie.2016.05.005>
- G, M. A. P. (2018). Jurnal Publikasi. Oleh: Nama Nomor Mahasiswa Jurusan: Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Mardiah, F., Islami, J., Irawan, M. F., & Pratama, I. N. (2024, June). Meninjau Dampak Kemiskinan Yang Terjadi Terhadap Masyarakat Kabupaten Dompu. In *SEMINAR NASIONAL LPPM UMMAT* (Vol. 3, pp. 807-821).
- Maku, O. E. (2019). Unemployment, poverty and economic growth in Nigeria. March. <https://doi.org/10.22367/jem.2019.35.01>

- Mustika, C. (2011). Pengaruh PDB dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia periode 1990-2008. Halaman tulisan Jurnal (Isi/Materi Jurnal), Tesis yang paling mendasar dari Malthus adalah bahwa jumlah penduduk cenderung meningkat lebih cepat dari persediaan bahan makanan. 1(4), 12–23.
- Pdrb, A., Ekonomi, S., Provinsi, U., & Jakarta, D. K. I. (2019). Indonesian treasury review, 4, 351–370.
- Zuhdiyati, N., David, D., Faktor, K. A., Yang, F., Kemiskinan, M., Zuhdiyaty, N., Kaluge, D., Pascasarjana, D., & Brawijaya, U. (2015). Kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir (Studi Kasus pada 33 Provinsi). *Atalay*, 27–31.